

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Rajawali Pers; Jakarta.
- C.F. Strong, 2010, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung. (Terjemahan)
- Feri Amsari, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelompok DPD di MPR RI, Indra J. Piliang, dan Bivitri Susanti, 2007, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta: DPD RI.
- Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer*

Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Sjachran Basah, 1981, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara di Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.



D. JURNAL/MAKALAH

Feri Amsari, 2013, *Presidensialisme dan Lembaga Kepresidenan*, Jurnal Konstitusi Volume II No. 1, hal. 33.

Saldi Isra, Yuliandri, et. al, *Pendapat Keahlian Terhadap Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah Tertanggal 15 Juni 2015.

Sirajuddin, 2013, *Dilema Dewan Perwakilan Daerah: Dari Asesoris Menuju Senator (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi Volume II No. 1, hal. 97-114.

Sunardi, 2013, *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Paska Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume II No. 1, hal. 115-129.

Yeni Nel Ikhwan, *Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah Tertanggal 15 Juni 2015.

E. INTERNET

<http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/321-paradigma-baru-legislasi>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/14/13010278/DPD.Ajukan.Uji.Materi.UU.tentang.MPR.DPR.DPD.dan.DPRD>

